

Lampiran 3.5. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Nomor : P.8/VI-BPPHH/2011

Tanggal : 30 Desember 2011

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

**PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini merupakan panduan dalam menyusun laporan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL, meliputi laporan penilaian dalam rangka Audit Tahap I, Audit Tahap II, dan Penilikan, serta resume hasil penilaian.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 jo. P.68/Menhut-II/2011 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin/Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
2. SNI 19-19011-2005 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
3. ISO/IEC 17021:2011 Conformity Assessment – Requirement for Bodies Providing Audit and Certification of Management Systems.
4. ISO/IEC 19011:2011 Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing.
5. Dokumen KAN DPLS 13 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL).

C. KERANGKA ISI LAPORAN AUDIT TAHAP I

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penilaian

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN DAN LPPHPL

2.1. Identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

2.2. Identitas LPPHPL

III. SITUASI UMUM

3.1. Situasi Kawasan

3.1.1. Letak Areal

- 3.1.2. Batas Areal
- 3.1.3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan
- 3.1.4. Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.1.5. Isu tenurial
- 3.2. Aksesibilitas dan Situasi Pembukaan Wilayah
- 3.3. Kondisi Biofisik
 - 3.3.1. Iklim
 - 3.3.2. Topografi
 - 3.3.3. Geologi dan Tanah
 - 3.3.4. Hidrografi
 - 3.3.5. Penutupan Lahan dan Fungsi Hutan
 - 3.3.6. Ragam Tipe Hutan dan Potensi Tegakan
 - 3.3.7. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar
 - 3.3.8. Potensi Bahan Tambang
- 3.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan
 - 3.4.1. Situasi Demografi Penduduk
 - 3.4.2. Situasi Agro-ekonomi
 - 3.4.3. Situasi Sosial Budaya
 - 3.4.4. Rencana Pengembangan wilayah
 - 3.4.5. Situasi Pemerintahan Lokal
 - 3.4.6. Situasi Penegakan Hukum
- 3.5. Situasi Pengelolaan Hutan
 - 3.5.1. Statistik Produksi
 - 3.5.2. Statistik Kegiatan Pembinaan Hutan
 - 3.5.3. Situasi Keuangan Perusahaan
 - 3.5.4. Situasi Manajemen Sumberdaya Manusia
 - 3.5.5. Situasi Pemasaran Kayu dan Hasil Hutan Lainnya
- IV. METODOLOGI PENILAIAN
 - 4.1. Penetapan Verifier
 - 4.2. Teknik verifikasi
 - 4.3. Penetapan Instrumen verifikasi
 - 4.4. Matriks Metode Verifikasi Untuk Setiap Indikator
- V. HASIL PENILAIAN
 - 5.1. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Prasyarat
 - 5.2. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Produksi
 - 5.3. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekologi
 - 5.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial
 - 5.5. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
- VI. KESIMPULAN
 - 6.1. Kesimpulan
 - 6.2. *Corrective Action Requests (CARs)*

D. KERANGKA ISI LAPORAN AUDIT TAHAP II

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran Penilaian

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN DAN LPPHPL

2.1. Identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

2.2. Identitas LPPHPL

III. SITUASI UMUM

3.1. Situasi Kawasan

3.1.1. Letak Areal

3.1.2. Batas Areal

3.1.3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan

3.1.4. Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah

3.1.5. Isu tenurial

3.2. Aksesibilitas dan Situasi Pembukaan Wilayah

3.3. Kondisi Biofisik

3.3.1. Iklim

3.3.2. Topografi

3.3.3. Geologi dan Tanah

3.3.4. Hidrografi

3.3.5. Penutupan Lahan dan Fungsi Hutan

3.3.6. Ragam Tipe Hutan dan Potensi Tegakan

3.3.7. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

3.3.8. Potensi Bahan Tambang

3.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Pemerintahan

3.4.1. Situasi Demografi Penduduk

3.4.2. Situasi Agro-ekonomi

3.4.3. Situasi Sosial Budaya

3.4.4. Rencana Pengembangan wilayah

3.4.5. Situasi Pemerintahan Lokal

3.4.6. Situasi Penegakan Hukum

3.5. Situasi Pengelolaan Hutan

3.5.1. Statistik Produksi

3.5.2. Statistik Kegiatan Pembinaan Hutan

3.5.3. Situasi Keuangan Perusahaan

3.5.4. Situasi Manajemen Sumberdaya Manusia

3.5.5. Situasi Pemasaran Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

IV. METODOLOGI PENILAIAN

- 4.1. Penetapan Verifier
- 4.2. Teknik verifikasi
- 4.3. Penetapan Instrumen verifikasi
- 4.4. Matriks Metode Verifikasi Untuk Setiap Indikator

V. HASIL PENILAIAN

- 5.1. Masukan dan Saran dari Konsultasi Publik
- 5.2. Analisa Keterkaitan dan Tindak Lanjut Dari Masukan dan Saran
- 5.3. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Prasyarat
- 5.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Produksi
- 5.5. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekologi
- 5.6. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial
- 5.7. Pengambilan Keputusan

VI. KESIMPULAN

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. *Corrective Action Requests (CARs)*

E. KERANGKA ISI LAMPIRAN

1. Berkas Administrasi Penugasan LPPHPL
2. Berkas Dokumen Legalitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
3. Berkas Dokumen Yang Menjadi Sumber Informasi Penilaian
 - a. Dokumen yang berasal dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
 - b. Dokumen yang berasal dari Instansi Kehutanan
 - c. Dokumen yang berasal dari Instansi Pemerintah Lainnya
 - d. Dokumen yang berasal dari Penelitian/Kajian
 - e. Dokumen yang berasal dari internet
4. Berkas Instrumen Penilaian
 - a. Tally sheet dan daftar rekapitulasi
 - b. Checklist dokumen
 - c. Butir wawancara dan notulen Forum Group Discussion
 - d. Butir wawancara dan notulen wawancara individual
 - e. Hasil isian kuesioner
 - f. Hasil isian checklist demonstrasi kegiatan lapangan
 - g. Hasil analisis kuantitatif/statistik
 - h. Hasil analisis digital
 - i. Hasil analisis laboratorium
5. Foto dan Rekaman Proses Penilaian
6. Peta-peta

F. KERANGKA ISI LAPORAN PENILIKAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN/HAK PENGELOLAAN DAN LPPHPL

2.1. Identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan

2.2. Identitas LPPHPL

III. SITUASI UMUM

3.1. Situasi Kawasan

3.1.1. Letak Areal

3.1.2. Batas Areal

3.1.3. Situasi Penggunaan dan Penguasaan Lahan

3.1.4. Situasi Rencana Tata Ruang Wilayah

3.1.5. Isu tenurial

3.2. Aksesibilitas dan Situasi Pembukaan Wilayah

3.3. Kondisi Biofisik

3.3.1. Iklim

3.3.2. Topografi

3.3.3. Geologi dan Tanah

3.3.4. Hidrografi

3.3.5. Penutupan Lahan Dan Fungsi Hutan

3.3.6. Ragam Tipe Hutan dan Potensi Tegakan

3.3.7. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

3.3.8. Potensi Bahan Tambang

3.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Kepemerintahan

3.4.1. Situasi Demografi Penduduk

3.4.2. Situasi Agro-ekonomi

3.4.3. Situasi Sosial Budaya

3.4.4. Rencana Pengembangan wilayah

3.4.5. Situasi Kepemerintahan Lokal

3.4.6. Situasi Penegakan Hukum

3.5. Situasi Pengelolaan Hutan

3.5.1. Statistik Produksi

3.5.2. Statistik Kegiatan Pembinaan Hutan

3.5.3. Situasi Keuangan Perusahaan

3.5.4. Situasi Manajemen Sumberdaya Manusia

3.5.5. Situasi Pemasaran Kayu dan Hasil Hutan Lainnya

IV. METODOLOGI PENILAIAN PENILIKAN

- 4.1. Penetapan Verifier
- 4.2. Teknik Verifikasi
- 4.3. Penetapan Instrumen Verifikasi
- 4.4. Matriks Metode Verifikasi Untuk Setiap Indikator

V. HASIL PENILAIAN PENILIKAN

- 5.1. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Prasyarat
- 5.2. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Produksi
- 5.3. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Ekologi
- 5.4. Hasil Penilaian Indikator Pada Kriteria Sosial
- 5.5. Nilai akhir gabungan

VI. KESIMPULAN

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. *Corrective Action Requests (CARs)*

G. KERANGKA RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Akreditasi :
- c. Alamat :
- d. Nomor telepon/faks/E-mail :
- e. Direktur :
- f. Tim Audit :
- g. Tim Pengambil Keputusan :

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan :
- b. Nomor & Tanggal SK :
- c. Luas dan Lokasi :
- d. Alamat kantor :
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus :

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I		
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan		
Konsultasi Publik		
Pertemuan Pembukaan		
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan		
Pengambilan Keputusan		

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan		
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap		
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan		
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik		
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang		

tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan		
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat		

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	
1.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
1.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	

1.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	
1.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	
1.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	
1.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	

Direktur Jenderal,

ttd.

Iman Santoso

NIP. 19530922 198203 1 001